



## Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>  
E-ISSN 2721-3617

### Pengaruh Teknologi Informasi dan sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Novita Nasir<sup>a</sup>, Rio Monoarfa<sup>b</sup>, Siti Pratiwi Husain<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup> Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend Sudirman No.6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email : [novitanasir@gmail.com](mailto:novitanasir@gmail.com)<sup>a</sup>, [rio@ung.ac.id](mailto:rio@ung.ac.id)<sup>b</sup>, [sitipratiwi@ung.ac.id](mailto:sitipratiwi@ung.ac.id)<sup>c</sup>

#### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received 01-07-2025

Revised 30-07-2025

Accepted 31-07-2025

**Kata Kunci:**

Teknologi Informasi,  
Sistem Pengendalian  
Intern, Kualitas  
Laporan Keuangan

**Keywords:**

Information  
Technology, Internal  
Control System,  
Financial Report  
Quality

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 43. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan 1) Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, 2) Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan 3) Teknologi informasi dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

#### ABSTRACT

This study aims to determine the effect of information technology and internal control systems on the quality of financial reports both partially and simultaneously. The data used are primary data obtained by distributing questionnaires to employees at the North Gorontalo Regency Finance Agency. The number of samples in this study was 43. Data analysis in this study used Multiple Regression analysis. The results of the study show 1) Information technology has a positive and significant effect on the quality of financial reports of the North Gorontalo Regency Regional Government, 2) Internal control systems have a positive and significant effect on the quality of financial reports of the North Gorontalo Regency Regional Government, and 3) Information technology and internal control systems simultaneously have a significant effect on the quality of financial reports of the North Gorontalo Regency Regional Government.

---

@2025 Novita Nasir, Rio Monoarfa, Siti Pratiwi Husain  
Under The License CC BY-SA 4.0

---

### PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi di berbagai negara, kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* menjadi semakin penting. Pemerintahan yang baik mencerminkan keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah

direncanakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki, termasuk keuangan daerah yang hasil pengelolaannya tercermin dalam laporan keuangan. Sebagai bentuk akuntabilitas, pemerintah wajib menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Laporan keuangan merupakan laporan yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah yang meliputi, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Arus Kas (LAK), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas laporan keuangan menjadikan informasi terkait dengan komponen-komponen laporan keuangan pemerintah berdasarkan (PP No. 71 Tahun 2010) bahwa kualitas laporan keuangan yang baik yaitu memiliki diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Kualitas Laporan keuangan Pemerintahan Daerah yang baik tidak hanya ditentukan oleh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan supremasi hukum. Namun, kualitas tata kelola yang baik tergantung pada faktor-faktor lain seperti daya tanggap, efektivitas kesetaraan berbasis konsensus, efisiensi dan visi strategis. Hal ini sejalan dengan karakteristik *good governance* United Nations Development Programme (UNDP) dan Bank Dunia). Karena banyaknya faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan pemerintah daerah, kualitas pelaporan pemerintah daerah menghasilkan kualitas yang berbeda di tingkat nasional dan daerah/kota (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021).

Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah secara keseluruhan. Data mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gorontalo Utara selama lima tahun terakhir memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan Kabupaten Gorontalo Utara telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun, meskipun meraih opini WTP, BPK tetap menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Misalnya, pada tahun 2023, BPK mencatat bahwa Kabupaten Gorontalo Utara memiliki tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar 69,57%, yang merupakan persentase terendah di antara tujuh entitas di Provinsi Gorontalo. Selain itu, terdapat temuan terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Temuan-temuan ini menekankan pentingnya peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas suatu laporan keuangan pemerintah daerah, diantaranya pengaplikasian sistem teknologi informasi dan pengendalian intern. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) merupakan faktor yang memengaruhi kualitas LKPD. Teknologi dipandang sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan

Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan multiprocessing (Pebriani, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian Teknologi informasi mempunyai manfaat atau kemudahan bagi seseorang dalam menghemat waktu maupun tenaga sehingga sangat membantu mempercepat proses penyampaian dan pemahaman informasi tentang pengelolaan keuangan. Aswandi juga menjelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi diharapkan dapat meningkatkan kinerja para akuntan dalam menyusun laporan keuangan dengan data yang akurat dan proses yang cepat (Sa'adah & Nasrullah, 2021).

Sementara pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dalam pengimputan, memproses penyajian laporan keuangan dan mengukur sumber daya suatu organisasi, sehingga laporan keuangan memberikan keyakinan keandalan. Pengendalian intern yang baik disertai praktek-praktek yang sehat di dalam tata kelola keuangan akan menjaga kekayaan perusahaan secara preventive, detektif dan korektif (Lestari & Ardini, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai bidang akuntansi di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara, didapatkan informasi bahwa sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada tahun 2025 masih menghadapi tantangan. Ketidakselarasan antara penatausahaan dan pelaporan mengharuskan penggunaan jurnal umum secara manual, meskipun pelatihan untuk bendahara dan pejabat pengelolaan keuangan telah dijadwalkan. Selanjutnya pengendalian intern yang melibatkan BPKP dan Inspektorat menunjukkan adanya upaya untuk memastikan kualitas laporan keuangan. Namun, komunikasi yang tidak efisien dan keterlambatan dalam pengumpulan data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sering kali menghambat proses pelaporan. Meskipun laporan keuangan telah memenuhi standar dan mendapatkan kriteria WTP, kualitasnya sangat bergantung pada ketepatan waktu dan kelengkapan data dari OPD. Oleh karena itu, diperlukan respon yang lebih cepat dari Kemendagri terhadap kendala sistem serta peningkatan kompetensi SDM untuk memperbaiki pengendalian intern. Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan mencakup optimalisasi SIPD dengan fitur yang lebih sesuai untuk kebutuhan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

Masalah-masalah tersebut menunjukkan betapa pentingnya melakukan penelitian tentang pengaruh teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana teknologi informasi yang lebih baik dan sistem pengendalian yang lebih kuat dapat membantu memperbaiki pengelolaan aset dan keuangan daerah. Dengan temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan mereka, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan bermanfaat bagi masyarakat.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### Teori Agen (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan hubungan antara dua pihak utama, yaitu prinsipal dan agen. Dalam teori ini menjelaskan hubungan antara *prinsipal* (pemilik) dan agen (manajer) dalam sebuah organisasi, serta bagaimana konflik kepentingan dapat menyebabkan biaya keagenan (*agency costs*). Mekanisme pengawasan dan insentif sangat penting untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat atau wewenang, sedangkan agen adalah pihak yang menerima mandat tersebut untuk melaksanakan tugas atas nama prinsipal. Dalam dunia bisnis, hubungan ini sering terjadi antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen). Namun, konsep ini juga relevan dalam berbagai bidang lain, termasuk sektor publik (Algameta, 2019).

Dalam sektor publik, teori keagenan sangat relevan karena pemerintah atau pejabat publik bertindak sebagai agen yang mengelola sumber daya atas nama masyarakat sebagai prinsipal. Seperti dalam bisnis, potensi konflik kepentingan juga dapat terjadi di sini. Misalnya, pejabat pemerintah mungkin lebih fokus pada kepentingan politik atau pribadi daripada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang kuat, seperti laporan keuangan yang transparan, partisipasi publik, serta regulasi yang jelas agar pemerintah tetap akuntabel.

Untuk memastikan laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas tinggi, diperlukan beberapa langkah, seperti penguatan sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi dalam pencatatan keuangan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang akuntansi dan audit. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori keagenan, risiko ketidaksesuaian laporan keuangan dengan kondisi nyata dapat dikurangi, sehingga masyarakat dapat lebih percaya terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Samsiah *et al.*, 2023).

Dalam penelitian ini, teori keagenan (*Agency Theory*) dapat menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Dalam konteks sektor publik, teori keagenan sangat tepat digunakan untuk menganalisis dinamika pertanggungjawaban (*accountability*) dan transparansi yang terjadi antara entitas pelaksana pemerintahan dan pihak yang memberikan mandat, yaitu masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan daerah, kualitas laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban agen kepada prinsipal. Laporan ini menjadi instrumen penting yang digunakan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai kinerja keuangan dan pengelolaan anggaran daerah. Maka, laporan keuangan yang berkualitas yang memenuhi kriteria relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami merupakan wujud nyata dari akuntabilitas publik. Teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berperan sebagai mekanisme tata kelola (*governance mechanisms*) yang mendukung prinsip-prinsip keagenan. Teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan serta pelaporan data keuangan, sementara sistem pengendalian intern memberikan jaminan bahwa kegiatan dan pelaporan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keduanya berkontribusi dalam mengurangi asimetri informasi dan memperkecil peluang moral hazard yang mungkin dilakukan oleh agen.

## **Kualitas Laporan Keuangan**

Dalam menyusun dan melaporkan hasil kinerja pemerintah daerah dalam bentuk laporan keuangan perlu untuk memperhatikan kualitas dari laporan keuangan. Kualitas dari laporan keuangan merupakan cerminan dari kinerja pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini juga menjadi penilaian bagi masyarakat apakah pemerintah daerah telah melakukan tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan daerah dengan baik. Kinerja pemerintah daerah yang baik tercermin dari kualitas laporan keuangan daerah yang baik, namun sebaliknya kinerja pemerintah daerah yang kurang baik, tercermin pula dari kualitas laporan keuangan yang kurang baik (Toban, 2022). Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan (Kementerian Keuangan RI, 2022). Adapun indikator dari Kualitas Laporan Keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan (Kementerian Keuangan RI, 2022).

## **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi merupakan aplikasi pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah oleh pemerintah daerah untuk dapat menggunakan semua jenis teknologi informasi dan komputer untuk menyediakan informasi dan layanan pemerintah kepada publik (Rifandi, 2018). Menurut Kaukab & Lufthiadi (2021), mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan perilaku sikap akuntan menggunakan teknologi informasi meliputi pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen serta proses kerja secara elektronik untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja dengan manfaat agar proses pelaporan keuangan berjalan dengan baik.

Menurut Muslihudin & Oktafianto (2016) indikator pemanfaatan teknologi informasi yaitu 1) Hardware yaitu terdiri dari komponen input, proses, output dan jaringan; 2) Software yaitu terdiri dari komponen operasi, utilitas dan aplikasi; 3) Data mencakup struktur data, keamanan dan integritas data; 4) Prosedur seperti dokumentasi, prosedur sistem, buku petunjuk operasi dan teknis; dan 5) Manusia yaitu pihak yang terlibat dalam penggunaan sistem informasi.

## **Sistem Pengendalian Internal**

Menurut Romney & Steinbart (2017), pengendalian internal adalah suatu proses karena termasuk didalam aktivitas operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan pengelolaan. pengendalian internal memberikan jaminan yang lengkap dan wajar untuk sulit dicapai. Selain sistem pengendalian intern memiliki keterbatasan, seperti kerentanan terhadap kesalahan sederhana, penilaian yang salah dan pengambilan keputusan, mengabaikan manajemen dan terjadinya kolusi. Menurut Mahmudi (2016), menyatakan bahwa instansi pemerintah harus membangun dan memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat menjadi buruk, salah satu penyebab utamanya berasal dari lemahnya sistem pengendalian internal. Adapun komponen-komponen Sistem Pengendalian Internal menurut Mahmudi (2016:21) adalah 1) Lingkungan; 2) Penilaian risiko; 3) Aktivitas Pengendalian; 4) Informasi dan komunikasi; dan 5) Pemantauan.

### Hipotesis Penelitian

- H1: Teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
- H2: Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
- H3: Teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2021) menjelaskan penelitian asosiatif bertujuan untuk Dengan desain ini, penelitian dapat mengeksplorasi sejauh mana penerapan teknologi informasi dan efektivitas sistem pengendalian intern berkontribusi terhadap penyusunan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Desain ini memungkinkan peneliti memberikan bukti konkret yang dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dan peningkatan tata kelola keuangan daerah.

### Definisi Operasional Variabel

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Teknologi informasi	Penggunaan hardware dan software yang digunakan untuk memberikan informasi guna membantu pihak internal dan eksternal dalam menjalankan tugasnya, dengan indikator:	1. Penggunaan hardware 2. Penggunaan Software 3. Jaringan Internet	Ordinal
Sistem pengendalian intern	Proses yang dijalankan, dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi mengenai keandalan laporan keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan indikator:	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Aktivitas pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan	Ordinal
Kualitas Laporan Keuangan	Karakteristik kualitatif dari suatu laporan yang menyajikan mengenai posisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah serta informasi lain yang merupakan hasil proses akuntansi selama periode tertentu yang akan digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, dengan indikator:	1. Relevan 2. Andal, 3. Dapat Dibandingkan 4. Dapat Dipahami.	Ordinal

### Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh Pegawai Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah 43 orang. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus sampling (sampling jenuh). Menurut Sugiyono (2021), yaitu teknik penentuan sampel bila

semua anggota populasi digunakan sebagai sampling. Dengan demikian jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 43 orang Pegawai Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara.

### Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Namun sebelum pengujian tersebut dilakukan, terlebih dahulu menguji kualitas instrument penelitian melalui uji validitas dan reliabilitas data. Kemudian dilakukan pengujian uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Adapun persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
 a = Nilai Kontanta  
 b = Nilai koefisien regresi  
 X1 = Teknologi informasi  
 X2 = Sistem pengendalian intern  
 e = error

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode *Kolmogorof Smirnov*. kriteria pengambilan keputusannya adalah Jika hasil pengujian memiliki tingkat signifikansi > 0,05 berarti data pada variabel terdistribusi secara normal. Sebaliknya Jika hasil pengujian memiliki tingkat signifikansi < 0,05 berarti data pada variabel terdistribusi secara tidak normal. Berikut hasil pengujian normalitas data.

Tabel 2. Tabel Hasil Uji Normalitas Data  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.56763044
	Absolute	.119
Most Extreme Differences	Positive	.061
	Negative	-.119
Kolmogorov-Smirnov Z		.779
Asymp. Sig. (2-tailed)		.579

Sumber : Diolah data SPSS Versi 21 (2025)

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,779 dengan nilai *asyp. Sig. (2-tailed)* atau probabilitas sebesar 0,579 yang berada diatas 0,05 seperti yang telah disyaratkan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Hasil analisis multikolinearitas dilihat dari tabel *Collinearity Diagnostic*. Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas Ketika nilai VIF yang diperoleh berada dibawah angka 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,10. Berikut hasil pengujiannya.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Teknologi Informasi	.982	1.018
SPI	.982	1.018

a. Dependent Variable: Kualitas Lap. Keu. Pemda

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21 (2025)

Berdasarkan hasil analisis pada table diatas, terlihat diperoleh untuk nilai VIF untuk variable Teknologi Informasi (X1) dan variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) memperoleh nilai VIF sebesar 1,018 dengan nilai tolerance 0,982. Dengan demikian angka tersebut dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.

## 3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas yang digunakan adalah uji *Glejser* dimana jika nilai probabilitas dari variabel independent terhadap nilai *absolute residual* diatas 0,05 maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Berikut hasil pengujian heterokedastisitas dengan uji *glejser*.

Tabel 4. Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	2.919	4.594		
1 Teknologi Informasi	-.047	.091	-.081	-.516	.609
SPI	.033	.052	.100	.634	.530

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21, (2025)

Berdasarkan pada hasil pengujian diatas, diperoleh seluruh variabel bebas memiliki nilai probabilitas lebih besar dari tingkat alpha (0,05) terhadap *absolute residual* yaitu variabel Teknologi Informasi (0,609) dan variabel Sistem Pengendalian Intern (0,530). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah heterokedastisitas.

## Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	20.056	7.221		
1 Teknologi Informasi	.509	.143	.480	3.571	.001
SPI	.192	.082	.317	2.359	.023

a. Dependent Variable: Kualitas Lap. Keu. Pemda

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21, (2025)

Berdasarkan hasil analisis diatas, model regresi linear berganda adalah sebagai berikut.

$$\hat{Y} = 20,056 + 0,509X1 + 0,192X2 + e$$

Dari model persamaan regresi tersebut, maka dapat diinterpretasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 20,056 menunjukkan nilai rata-rata variabel Kualitas Laporan Keuangan sebesar 20,056 dengan ketentuan nilai variabel Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern bernilai konstan atau ceteris paribus.
- 2) Nilai Koefisien Regresi Variabel X1 (Teknologi Informasi) sebesar 0,509 atau sebesar 50,9% menunjukkan setiap perubahan variabel Teknologi Informasi sebesar 1 persen maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 50,9%.
- 3) Nilai Koefisien Regresi Variabel X2 (Sistem Pengendalian Intern) sebesar 0,192 atau sebesar 19,2% menunjukkan setiap perubahan variabel Sistem Pengendalian Intern sebesar 1 persen maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 19,2%.

#### Uji T (Secara Parsial)

Setelah pengujian analisis regresi dilakukan selanjutnya akan dilaksanakan pengujian pengaruh secara parsial dari variabel bebas (Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern) terhadap variabel terikat yakni Kualitas Laporan Keuangan. Penentuan kriteria uji didasarkan pada tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5%. Berdasarkan tabel 5 hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

- 1) Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan  
Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (H1 diterima)
- 2) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan  
Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai signifikansi  $0,023 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (H2 diterima).

#### Uji F (Secara Simultan)

Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil pengujian model regresi (simultan) pengaruh Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil pengujian simultan (Uji F) ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Hasil Uji f (Secara Simultan)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	358.369	2	179.185	8.180	.001 <sup>b</sup>
	Residual	876.256	40	21.906		
	Total	1234.626	42			

a. Dependent Variable: Kualitas Lap. Keu. Pemda

b. Predictors: (Constant), SPI, Teknologi Informasi

Sumber : Data diolah SPSS, (2025)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai probabilitas 0,001 lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Sehingga dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

### Uji R Square (Koefisien determinasi)

Untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.539 <sup>a</sup>	.290	.255	4.68043

a. Predictors: (Constant), SPI, Teknologi Informasi

b. Dependent Variable: Kualitas Lap. Keu. Pemda

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21, (2025)

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel diatas menunjukkan besarnya koefisien determinasi yang disesuaikan atau angka *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,255 atau sebesar 25,5%. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 25,5% variabilitas Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh variabel Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern. Sementara untuk sisanya sebesar 74,5% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Berpengaruh positif dan signifikan dalam hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dengan penggunaan teknologi informasi yang semakin baik oleh aparatur pemerintah di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi oleh Jensen dan Meckling (1976). Dalam konteks pemerintahan daerah, hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen (agent) dan masyarakat sebagai prinsipal (principal) menciptakan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Agen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas sumber daya yang dikelola atas nama prinsipal. Namun, karena adanya potensi asimetris informasi dan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, maka diperlukan sistem atau mekanisme yang dapat meminimalkan risiko moral hazard serta meningkatkan kepercayaan publik. Teknologi informasi berperan penting sebagai mekanisme pengawasan (*monitoring mechanism*) dalam konteks hubungan agensi ini. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang baik maka proses pelaporan keuangan menjadi lebih transparan, akurat, dan tepat waktu, sehingga memperkecil peluang manipulasi data serta meningkatkan keandalan informasi keuangan yang disampaikan kepada publik. Dengan demikian, temuan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan memperkuat asumsi dalam teori agensi bahwa mekanisme sistematis seperti teknologi informasi dapat mengurangi ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) antara agen dan prinsipal. Hal ini pada akhirnya mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik (*good governance*).

Lebih lanjut, penggunaan teknologi informasi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan. Hal ini

mengurangi potensi kesalahan manusia dan meningkatkan integritas data. Semakin tinggi kualitas teknologi informasi yang digunakan, semakin besar kemungkinan agen menyusun laporan keuangan yang memenuhi kriteria relevansi, keandalan, dan akuntabilitas, sebagaimana yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Anggadini *et al.*, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aldino & Septiano (2021), Yuliana Letisya & Nuratama (2022), Imelia *et.al.* (2021), Wulandari & Yuliati (2023), dan Hadrah & Latief (2024) yang hasil penelitiannya mengemukakan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Dengan demikian pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan penggunaan secara optimal dengan menggunakan komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (internet, intranet), *electronic commerce*, dan sejenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud ialah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan pemerintah daerah. Dalam pemerintah daerah penggunaan sistem komputerisasi akuntansi pada pemerintah daerah akan membantu mempercepat kegiatan pencatatan, penyajian, menganalisa laporan keuangan pemerintah daerah karena computer mempunyai aplikasi akuntansi yang diciptakan untuk mengamati transaksi-transaksi akuntansi ke dalam laporan dan untuk pengambilan keputusan yang sehubungan dengan keadaan keuangan dalam satu periode pelaporan (Nilamsari, 2021).

## **2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Berpengaruh positif dan signifikan dalam hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dengan sistem pengendalian intern yang berjalan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Badan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Menurut Mahmudi (2016), menyatakan bahwa instansi pemerintah harus membangun dan memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat menjadi buruk, salah satu penyebab utamanya berasal dari lemahnya sistem pengendalian internal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Teori Agensi (*Agency Theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), yaitu dalam konteks pemerintahan daerah, masyarakat sebagai prinsipal mempercayakan pengelolaan keuangan publik kepada pemerintah daerah sebagai agen. Namun, hubungan ini mengandung potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi, di mana agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan prinsipal dan berpotensi untuk tidak bertindak sepenuhnya sesuai kepentingan prinsipal. Untuk meminimalisasi risiko tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan dan kontrol yang memadai, salah satunya melalui sistem pengendalian intern (SPI). Sistem pengendalian intern yang efektif dapat berfungsi sebagai alat monitoring yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan pemerintah dijalankan sesuai dengan peraturan, prosedur, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam kerangka teori agensi, SPI merupakan bagian dari upaya mengurangi biaya agensi (*agency cost*) yang timbul akibat potensi penyalahgunaan kewenangan oleh agen. Dengan adanya sistem pengendalian yang

kuat, risiko kesalahan pelaporan, kecurangan, maupun manipulasi informasi dapat ditekan, sehingga kualitas laporan keuangan akan meningkat. Lebih jauh, unsur-unsur pengendalian intern seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, semuanya berkontribusi pada penyusunan laporan keuangan yang relevan, andal, jujur, dan dapat diverifikasi. Sistem ini juga meningkatkan kepercayaan publik karena menunjukkan bahwa agen (pemerintah daerah) bekerja dalam koridor pengawasan yang akuntabel.

Dengan demikian, pengaruh positif dan signifikan dari sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan menegaskan pentingnya kontrol internal dalam mengurangi informasi asimetris, meningkatkan transparansi, dan memastikan akuntabilitas publik, sebagaimana ditekankan dalam teori agensi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aldino & Septiano (2021), Yuliana Letisya & Nuratama (2022), Imelia et.al. (2021), Wulandari & Yuliati (2023), dan Hadrah & Latief (2024) yang hasil penelitiannya mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

### **3. Pengaruh Simultan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh teknologi informasi dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Gorontalo Utara.

Teknologi informasi berperan penting sebagai mekanisme pengawasan (*monitoring mechanism*) dalam konteks hubungan agensi ini. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang baik maka proses pelaporan keuangan menjadi lebih transparan, akurat, dan tepat waktu, sehingga memperkecil peluang manipulasi data serta meningkatkan keandalan informasi keuangan yang disampaikan kepada publik. Dengan demikian, temuan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan memperkuat asumsi dalam teori agensi bahwa mekanisme sistematis seperti teknologi informasi dapat mengurangi ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) antara agen dan prinsipal. Hal ini pada akhirnya mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik (*good governance*).

Sementara sistem pengendalian intern yang efektif dapat berfungsi sebagai alat monitoring yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan pemerintah dijalankan sesuai dengan peraturan, prosedur, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam kerangka teori agensi, SPI merupakan bagian dari upaya mengurangi biaya agensi (*agency cost*) yang timbul akibat potensi penyalahgunaan kewenangan oleh agen. Dengan adanya sistem pengendalian yang kuat, risiko kesalahan pelaporan, kecurangan, maupun manipulasi informasi dapat ditekan, sehingga kualitas laporan keuangan akan meningkat. Lebih jauh, unsur-unsur pengendalian intern seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, semuanya berkontribusi pada penyusunan laporan keuangan yang relevan, andal, jujur, dan dapat diverifikasi. Sistem ini juga meningkatkan kepercayaan publik karena menunjukkan bahwa agen (pemerintah daerah) bekerja dalam koridor pengawasan yang akuntabel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aldino & Septiano (2021), Yuliana Letisya & Nuratama (2022), Imelia et.al. (2021), Wulandari

& Yuliati (2023), dan Hadrah & Latief (2024) yang hasil penelitiannya mengemukakan bahwa teknologi informasi dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Penggunaan sistem komputerisasi akuntansi pada pemerintah daerah akan membantu mempercepat kegiatan pencatatan, penyajian, menganalisa laporan keuangan pemerintah daerah karena computer mempunyai aplikasi akuntansi yang diciptakan untuk mengamati transaksi-transaksi akuntansi ke dalam laporan dan untuk pengambilan keputusan yang sehubungan dengan keadaan keuangan dalam satu periode pelaporan.
2. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat berfungsi sebagai alat monitoring yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan pemerintah dijalankan sesuai dengan peraturan, prosedur, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

### **Keterbatasan**

Dalam penelitian ini tidak luput dari keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya dilakukan pada satu kabupaten di Provinsi Gorontalo, sehingga hasil penelitian tidak dapat di generalisasikan untuk daerah yang lain.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka berikut ini beberapa saran peneliti yang dapat dipertimbangkan.

1. Kepada Pemerintah Daerah Gorontalo Utara agar dapat terus mendukung penggunaan teknologi informasi yang sudah sangat baik. Namun penggunaan teknologi yang sudah sangat baik, perlu juga dibarengi dengan pelatihan lanjutan bagi pegawai agar dapat menguasai dan memanfaatkan seluruh fungsi yang tersedia dalam software secara lebih efektif. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi berkala terhadap kecocokan software dengan kebutuhan operasional yang terus berkembang. Hal ini dikarenakan dalam hasil penelitian ini kelemahan yang masih perlu ditingkatkan lagi adalah penggunaan software akuntansi untuk mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Kepada pemerintah daerah agar terus meningkatkan sistem pengendalian intern agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, terutama pada bagian Penilaian Risiko, aktivitas pengendalian, dan komunikasi & informasi memperoleh nilai rata-rata dengan kategori baik, sehingga masih terdapat ruang untuk perbaikan agar sistem pengelolaan risiko berjalan lebih optimal.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai Kualitas Laporan Keuangan agar dapat menggunakan variabel yang berbeda yang tidak

diteliti dalam penelitian ini, karena nilai koefisien determinasi yang diperoleh hanya sebesar 25,5%, yang berarti masih ada 74,5% yang dipengaruhi oleh variabel lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldino, H.P. & Septiano, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi, Pengendalian Internal Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(2): 50–62.
- Algameta, M.F. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hadrah, H. & Latief, M.A.A. (2024). The Influence of Information Technology Utilization and Use on the Quality of Financial Reports. *INCOME: Innovation of Economics and Management*, 4(1): 15–18.
- Herindraningrum, F.F. & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia : Literature Review. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(2): 157–171.
- Imelia, D., Rahayu, S. & Wiralestar (2021). The Effect Of Human Resources Competency, Participation Of Budget Development, Utilization Of Information Technology And Internal Control Systems On The Quality Of Financial Report. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 6(3): 149–163.
- Kaukab, M.E. & Lufthiadi, R. (2021). Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Industri Perhotelan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 10(1): 34–50.
- Kementerian Keuangan RI (2022). *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Lestari, I.N. & Ardini, L. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(9): 1–6. Tersedia di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jab/article/view/12258/11837>.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muslihudin & Oktafianto. (2016). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur dan UML*. Yogyakarta: Andi.
- Nilamsari, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada OPD Kota Semarang). Universitas

Muhammadiyah Semarang.

- Pebriani, R.A. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(1): 55–62.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Rifandi, M. (2018). Pengaruh Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 14(2): 48–61.
- Romney, M.B. & Steinbart, P.J. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi*. 14 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Sa'adah, S. & Nasrullah, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. *Journal of Public Accounting (JPA)*, 1(1): 14–24.
- Samsiah, S., Putri, A.M. & Winarni, W. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau. *Akuntansi 45*, 4(1): 22–31.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Toban, A. (2022). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wulandari, A.D. & Yuliati, A. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1): 637–649.
- Yuliana Letisya, N.K. & Nuratama, I.P. (2022). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Teknologi Informasi Pada Kualitas Laporan Keuangan Lpd Se-Kota Denpasar. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 3(1): 308–324.